



Integrasi Pemetaan Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Muhammad Khalil^{1*}, Agus Ahmad Safe'i¹, Romanur Aziz¹

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan
Gunung Djati, Bandung

*Email : kbolil.ar03@gmail.com

ABSTRAK

Integrasi pemetaan sosial dalam riset aksi memberikan kontribusi strategis dalam membangun pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan *Participatory Action Research* serta Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PkM Sisdamas), didukung metode kualitatif dan teknologi *Geographic Information System* (GIS), digunakan untuk menggali kebutuhan, potensi, dan norma sosial di Kampung Cipulus. Hasil menunjukkan bahwa *pemetaan sosial* menghasilkan data spasial dan sosial yang akurat sebagai dasar penyusunan program. Proses konsensus yang terbangun melalui forum warga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program. Norma sosial seperti musyawarah, dan kepercayaan berfungsi sebagai penguat legitimasi dan keberlanjutan program. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kekuatan nilai dan kohesi sosial.

Kata Kunci : Pemetaan Sosial; Pemberdayaan Ekonomi; Riset Aksi; Partisipasi

ABSTRACT

The integration of social mapping within action research contributes strategically to building community-based economic empowerment. Utilizing a Participatory Action Research Approach and Community Service Based on Community Empowerment (PkM Sisdamas), supported by qualitative methods and Geographic Information System (GIS) technology, this study explores community needs, potentials, and social norms in Cipulus Village. The findings reveal that social mapping produces accurate spatial and social data to guide planning. Consensus built through citizen forums fosters active participation and strengthens program ownership. Social norms such as deliberation, and trust serve to legitimize and sustain empowerment efforts. These insights affirm that successful empowerment depends not only on technical planning but also on the strength of shared values and social cohesion.

Keywords : Social Mapping; Economic Empowerment; Action Research; Participation

PENDAHULUAN

Kampung Cipulus merupakan wilayah yang menghadapi tantangan signifikan dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap teknologi dan pasar. Meskipun berbagai program telah diterapkan di wilayah ini, sebagian besar tidak berkelanjutan karena lemahnya basis data serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data dan partisipatif seperti pemetaan sosial menjadi sangat krusial dalam merancang intervensi pembangunan yang kontekstual (Khalil et al., 2024).

Pemberdayaan masyarakat telah lama menjadi pendekatan strategis dalam pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang menentukan arah transformasi sosial dan ekonomi mereka. Salah satu metode yang menonjol dalam paradigma ini adalah pemetaan sosial, yaitu proses sistematis untuk menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis suatu komunitas secara partisipatif. Pendekatan ini telah terbukti dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur sosial dan potensi lokal suatu wilayah (Gunawan & Sutrisno, 2021). Dalam praktiknya, pemetaan sosial digunakan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi hambatan dan peluang, serta menemukan aktor-aktor kunci yang dapat menjadi motor perubahan sosial (Siti Jubaedah et al., 2022).

Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan (PkM Sisdamas), pemetaan sosial menjadi bagian integral dari siklus intervensi. Terdapat empat tahap utama dalam PKM Sisdamas, yaitu (1) Sosialisasi Awal, Rembuk Warga dan Refleksi Sosial; (2) Pemetaan Sosial dan Organisasi Masyarakat; (3) Perencanaan Partisipatif dan Sinergi Program; serta (4) Pelaksanaan Program, Monitoring dan Evaluasi (Fridayanti et al., 2019). Tahap kedua berfungsi sebagai fondasi strategis dengan menghimpun data kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menyusun peta sosial yang mencerminkan dinamika dan kebutuhan masyarakat secara kontekstual (Cochrane, Corbett, & Keller, 2014).

Pendekatan dakwah berbasis pemberdayaan menambahkan dimensi transendental dalam pemberdayaan masyarakat, di mana nilai-nilai spiritual seperti Tadbir (manajemen), Tathwir (pengembangan), Irsyad (bimbingan), dan Tabligh (penyampaian) menjadi prinsip-prinsip etis yang mengarahkan program intervensi (Siregar, 2021). Integrasi pemetaan sosial dengan kerangka pemberdayaan dan dakwah menghasilkan sinergi yang kuat: pemetaan menyediakan data sosial yang komprehensif, pemberdayaan merancang intervensi yang kontekstual, dan dakwah menyisipkan nilai-nilai spiritual sebagai landasan transformasi sosial (Ahriani, 2022; Gustian et al., 2023).

Kajian terhadap penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pemetaan sosial telah digunakan secara luas dalam berbagai konteks pemberdayaan masyarakat, dengan pendekatan dan tujuan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryati, Sulistyowati, Setiawan, dan Noor (2020) berjudul *Pemetaan Sosial (Social Mapping) Masyarakat dalam Upaya Mendukung Pengembangan Usabatani Polikultur Perkebunan Terintegrasi (UTPPT)* bertujuan untuk memahami kondisi sosial masyarakat pedesaan guna mendukung pengembangan sistem pertanian polikultur. Dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), penelitian ini menemukan bahwa pemetaan sosial efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar, potensi sumber daya lokal, dan modal sosial masyarakat. Temuan tersebut mendukung perumusan strategi pengelolaan lahan dan penguatan kelembagaan pertanian. Meski demikian, fokus utamanya terbatas pada sektor pertanian, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji pemetaan sosial dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai instrumen riset aksi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Nuryati, Sulistyowati, Setiawan, & Noor, 2020).

Studi oleh Wiyanto dan Parmadi (2019) mengenai dampak keberadaan Terminal BBM Pertamina di Sampang, Madura, menunjukkan bahwa pemetaan sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur sosial, persepsi masyarakat, dan potensi konflik akibat aktivitas korporasi. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menempatkan pemetaan sosial sebagai alat mitigasi sosial, terutama dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada peran masyarakat; jika dalam penelitian tersebut masyarakat lebih sebagai penerima dampak, maka dalam penelitian ini masyarakat diposisikan sebagai aktor utama dalam proses pemberdayaan berbasis partisipasi (Wiyanto & Parmadi, 2019). Selanjutnya, Putra dan Dilham (2017) meneliti pemetaan sosial ekonomi di Kelurahan Bukit Timah, Dumai Timur, dengan tujuan mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan merumuskan strategi pemberdayaan berbasis UMKM. Hasilnya menunjukkan perlunya penguatan kapasitas SDM dan jejaring sosial ekonomi. Penelitian ini relevan dari sisi fokus ekonomi, namun bersifat deskriptif dan tidak mengadopsi pendekatan riset aksi seperti dalam penelitian ini yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan (Putra & Dilham, 2017).

Penelitian Iskandar Zainuddin Rela (2023) menyoroti pemetaan sosial dan partisipasi stakeholder dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Isu-isu strategis seperti pengembangan sektor pertanian, peningkatan layanan dasar, dan penguatan kelembagaan menjadi fokus utama. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam proses perencanaan, namun belum mengembangkan integrasi sistematis antara pemetaan sosial dan metodologi riset aksi seperti pendekatan Sisdamas yang menjadi kerangka utama

penelitian ini (Rela, 2023). Sementara itu, Abidin dan Mais (2022) dalam penelitian mereka mengenai pelaksanaan CSR di PT Bumi Suksesindo menunjukkan bahwa pemetaan sosial menjadi dasar dalam merancang program CSR yang kontekstual dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa pemetaan sosial berguna untuk mengidentifikasi isu strategis dan meningkatkan keterlibatan stakeholder. Meski demikian, fokusnya tetap pada kepentingan korporat, bukan pada pembangunan partisipatif akar rumput seperti dalam penelitian ini (Abidin & Mais, 2022).

Lokasi penelitian ini adalah Kampung Cipulus, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan keragaman sosial ekonomi, keterbatasan akses pasar, dan belum optimalnya potensi lokal. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat tidak sekadar menjadi objek penelitian, melainkan mitra aktif yang terlibat dalam seluruh tahapan riset.

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana pemetaan sosial mampu mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan serta permasalahan masyarakat. Kedua, bagaimana proses konsensus antara peneliti dan masyarakat dibangun dalam upaya pemberdayaan. Ketiga, bagaimana norma sosial berperan dalam menciptakan keberlanjutan pemberdayaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan riset aksi yang berorientasi pada perubahan sosial melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Riset aksi juga menjadi metode yang tepat untuk mengembangkan partisipasi aktif serta mendorong masyarakat agar menjadi pelaku utama dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Metode ini sejalan dengan pendekatan kualitatif karena berupaya memahami dinamika sosial dan proses perubahan berdasarkan realitas yang dialami oleh subjek penelitian.

Penelitian ini juga mengadopsi teknologi *Geographic Information System* (GIS) sebagai bagian dari proses pemetaan sosial. Dengan teknologi ini, data spasial dan nonspasial dapat dianalisis secara visual untuk mengidentifikasi area prioritas intervensi (Kurniadi, Mulyani, Firmansyah, & Abania, 2022). Selain itu, pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) diintegrasikan guna memastikan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses, dari identifikasi masalah hingga monitoring dan evaluasi (Meilindika & Khairunnisa, 2024). Pendekatan ini memastikan bahwa riset tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga mendorong perubahan nyata yang berkelanjutan di tingkat komunitas.

LANDASAN TEORITIS

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan merupakan agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada kemandirian, partisipasi, dan pengelolaan potensi lokal. Kampung Cipulus, sebagai salah satu wilayah dengan kompleksitas sosial dan ekonomi yang tinggi, menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan akses terhadap teknologi, pasar, dan informasi. Meskipun berbagai intervensi program telah diimplementasikan, sebagian besar belum menunjukkan keberlanjutan yang optimal. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan pendekatan berbasis data seperti pemetaan sosial menjadi krusial sebagai landasan dalam merancang program pemberdayaan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis pada realitas komunitas (Khalil et al., 2024). Pemetaan sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnostik, tetapi juga sebagai mekanisme dialog sosial yang memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses transformasi sosial dan ekonomi.

Integrasi merupakan konsep kunci dalam pendekatan interdisipliner yang menekankan pentingnya menggabungkan berbagai disiplin ilmu, metode, dan perspektif guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap suatu fenomena sosial (Almuarif, Hanani, Devi, & Syafitri, 2023). Dalam konteks sosial, integrasi dipandang sebagai proses penyatuan antara teori dan praktik, serta antara pengetahuan akademik dengan realitas masyarakat. Dalam pendekatan riset aksi, integrasi menjadi landasan metodologis untuk memadukan tindakan dan refleksi secara simultan (Almuarif et al., 2023). Salah satu pendekatan klasik terhadap integrasi sosial dikemukakan oleh Émile Durkheim melalui konsep solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik muncul dalam masyarakat homogen yang nilai-nilainya seragam, sementara solidaritas organik berkembang dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana keterikatan sosial terbentuk dari pembagian kerja dan saling ketergantungan. Dalam pandangan William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkoff, integrasi sosial baru tercapai ketika tiga prasyarat terpenuhi: kebutuhan anggota masyarakat saling terhubung, terdapat konsensus terhadap norma sosial, dan norma tersebut berfungsi secara berkelanjutan (Yuliadi & Apriansyah, 2025). Ketiganya membentuk struktur sosial yang memungkinkan masyarakat bergerak ke arah kohesi dan stabilitas. Dalam konteks pemberdayaan, teori ini sangat relevan, karena menekankan bahwa perubahan sosial tidak bisa dilepaskan dari norma, kebutuhan, dan kesepakatan kolektif.

Pemetaan sosial dalam kajian pengembangan masyarakat dipahami sebagai suatu pendekatan strategis untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai karakteristik, potensi, dan permasalahan komunitas. Tidak sekadar bersifat spasial, pemetaan ini juga mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, serta

lingkungan yang hidup dalam keseharian masyarakat. Dengan kata lain, pemetaan sosial menjadi alat penting untuk memahami konteks lokal secara menyeluruh sebelum melakukan intervensi program. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pemetaan sosial memiliki fungsi advokatif, yakni memberikan suara kepada kelompok marjinal yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan. (Abidin & Mais, 2022).

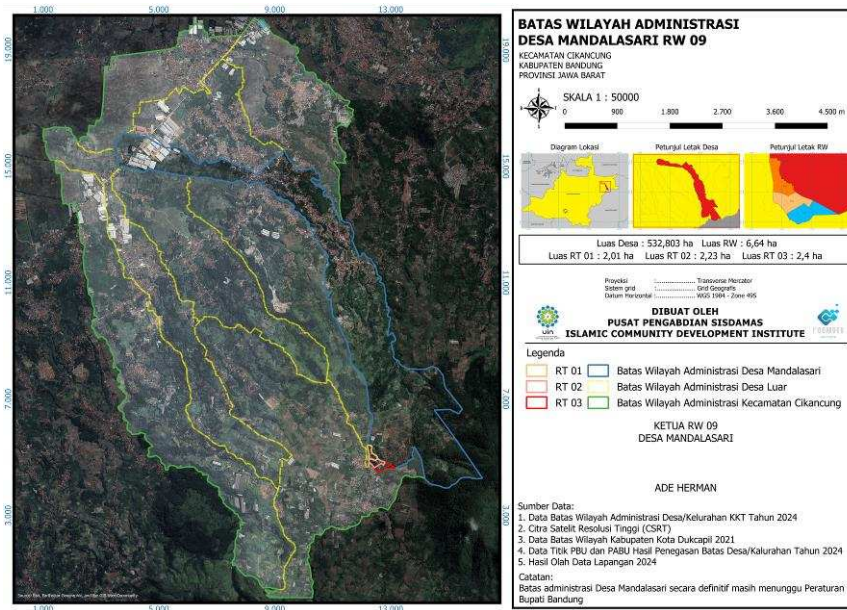
Pemberdayaan ekonomi merujuk pada proses transformasi sosial yang memungkinkan individu dan kelompok untuk memperoleh kontrol atas sumber daya ekonomi dan sosial yang relevan. Menurut Efendi dkk. (2021), pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam membuat keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka (Efendi et al., 2021). Dalam teori human capabilities yang dikembangkan oleh Amartya Sen, pemberdayaan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai akses terhadap pendapatan, melainkan juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara bebas (Habib, 2021). Pendekatan ini sangat penting dalam konteks Kampung Cipulus yang memiliki kekayaan lokal berupa hasil tani, keterampilan warga, serta jaringan sosial yang belum dimobilisasi secara optimal.

Riset aksi merupakan pendekatan penelitian yang berupaya menyatukan proses penelitian dengan praktik sosial untuk menciptakan perubahan nyata dalam masyarakat. Kemmis menjelaskan bahwa riset aksi adalah metode kolaboratif yang melibatkan peneliti dan komunitas secara aktif untuk merumuskan masalah, merancang tindakan, serta mengevaluasi dampak dari intervensi yang dilakukan (Leuhery, Amalo, Cakranegara, Widaningsih, & Mere, 2023). Pendekatan ini melampaui tujuan akademis semata karena menekankan aksi sosial yang transformatif sebagai bagian dari proses ilmiah. Seperti yang ditegaskan oleh Pasaribu (2021), riset aksi berperan dalam “menghadirkan ruang bersama bagi komunitas untuk mendefinisikan ulang persoalan mereka dan mengembangkan solusi berbasis pengalaman.” Dalam kerangka tersebut, riset aksi tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga membangun konsensus sosial dan menumbuhkan kepemilikan kolektif atas program pemberdayaan yang dilaksanakan (Pasaribu, 2021).

Dengan memadukan konsep integrasi sosial, pemetaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan riset aksi, penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan yang dibangun melalui data, refleksi sosial, dan norma-norma lokal. Keempat teori ini menjadi dasar metodologis dan filosofis dalam menyusun strategi pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya berbasis kebutuhan, tetapi juga berpijak pada nilai, potensi, dan partisipasi kolektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Cipulus, yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, memiliki sejarah yang cukup unik dalam proses pembentukan komunitasnya. Awalnya merupakan kawasan hutan belantara tanpa penghuni, wilayah ini mulai berkembang sebagai permukiman sejak akhir 1990-an, dipicu oleh inisiatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama air bersih. Penemuan mata air di bawah pohon pulus menjadi titik awal terbentuknya identitas sosial dan toponimi kampung. Nama “Cipulus” berasal dari gabungan kata dalam bahasa Sunda, “Ci” yang berarti air, dan “Pulus” yang merujuk pada nama pohon tempat sumber air itu ditemukan. Transformasi kawasan ini dari tak berpenghuni menjadi permukiman aktif menggambarkan dinamika sosial yang tumbuh secara organik, sekaligus memperlihatkan kekuatan gotong royong dalam membentuk solidaritas sosial dan identitas lokal.



Sumber: Assessment Pemetaan Sosial

Gambar 1. Peta Batas Wilayah Administratif Kampung Cipulus

Dalam perkembangan terkini, Desa Mandalasari yang menaungi Kampung Cipulus secara administrative memiliki struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup kompleks. Secara demografis, jumlah penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta dominasi usia produktif, menjadi modal sosial yang signifikan. Namun demikian, tantangan struktural masih ditemukan, terutama dalam bidang ekonomi. Ketergantungan pada sektor pertanian yang bersifat musiman dan minimnya diversifikasi usaha menyebabkan

perguruan tinggi. Hal ini menjadi indikator rendahnya akses terhadap pendidikan yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kapasitas usaha.

Temuan pemetaan sosial juga memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki aset keterampilan dan potensi lokal yang belum termanfaatkan secara optimal. Misalnya, terdapat kelompok perempuan yang memiliki keahlian dalam produksi makanan tradisional seperti rangginang dan keripik singkong, namun belum memiliki akses pasar dan modal usaha. Selain itu, terdapat aktivitas ekonomi rumah tangga lain seperti pembuatan konveksi rumahan dan peternakan kecil, namun belum tersinergi dalam bentuk kelembagaan ekonomi berbasis komunitas. Berdasarkan peta sosial yang disusun, daerah yang memiliki potensi ekonomi terbesar berada di wilayah RW 06 dan RW 07 yang relatif padat penduduk dan memiliki akses jalan lebih baik dibanding RW lain.

Proses konsensus antara peneliti dan masyarakat terbangun melalui forum rembung warga yang diselenggarakan secara partisipatif. Forum ini tidak hanya berfungsi untuk memvalidasi temuan pemetaan, tetapi juga menjadi ruang refleksi kolektif bagi masyarakat dalam menyusun skala prioritas program. Hasil kesepakatan menunjukkan bahwa tiga kebutuhan utama masyarakat adalah pelatihan kewirausahaan (dipilih oleh 85% peserta FGD), pendampingan penguatan UMKM (74%), dan digitalisasi pemasaran melalui media sosial serta *e-commerce* lokal (65%). Adapun kelompok sasaran utama adalah ibu rumah tangga usia produktif dan pemuda desa yang tidak melanjutkan pendidikan.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa norma sosial seperti gotong royong, rasa hormat pada tokoh masyarakat, dan nilai kekeluargaan masih hidup kuat dalam komunitas. Norma ini berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat legitimasi terhadap program pemberdayaan yang dirancang. Dalam praktiknya, norma tersebut tercermin dalam keterlibatan aktif masyarakat selama proses pemetaan, partisipasi dalam forum diskusi, serta kesediaan untuk berbagi aset dan sumber daya seperti lahan, waktu, dan keahlian demi kepentingan bersama. Dengan mengintegrasikan hasil pemetaan sosial, dinamika konsensus warga, dan kekuatan norma lokal, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan riset aksi berbasis Sisdamas dapat menjadi model intervensi yang efektif dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Identifikasi dan perumusan kebutuhan serta masalah yang ada di Kampung Cipulus

Pemetaan sosial merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam riset aksi berbasis masyarakat, karena berfungsi sebagai proses identifikasi kebutuhan dan potensi lokal yang mendalam. Pada penelitian ini, pemetaan dilakukan melalui

observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan pelaku usaha mikro di Kampung Cipulus, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Proses ini bertujuan untuk menggambarkan lanskap sosial dan ekonomi masyarakat secara utuh, sekaligus menjadi landasan awal dalam merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Tabulasi Data Masalah di Kampung Cipulus

| No | Masalah | Jumlah Individu yang Menyuarakan |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Rendahnya tingkat pendidikan | 1 |
| 2 | Air tidak mengalir ke lahan pertanian | 3 |
| 3 | Tidak adanya fasilitas lembaga pendidikan non-formal (agama) | 1 |
| 4 | Keterbatasan ekonomi dan modal usaha/tani | 8 |
| 5 | Tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) | 1 |
| 6 | Sarana peribadatan tidak memadai | 1 |
| 7 | Pergaulan bebas dan kenakalan remaja | 5 |
| 8 | Hasil panen dijual dengan harga murah | 4 |
| 9 | Anak-anak putus sekolah | 2 |
| 10 | Lingkungan tidak bersih dari sampah | 3 |
| 11 | Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan | 5 |
| 12 | Kekurangan tenaga pendidik | 1 |
| 13 | Tidak adanya modal untuk pertanian | 3 |
| 14 | Kurangnya kepekaan orang tua terhadap anak-anak | 2 |
| 15 | Penghasilan berkurang saat musim kemarau | 3 |
| 16 | Kurang antusias terhadap pendidikan | 1 |
| 17 | Adanya kelompok anak-anak tertentu (mengelompok negatif) | 1 |
| 18 | Tidak adanya kelompok kesenian | 1 |
| 19 | Kurangnya antusias anak-anak terhadap kegiatan pengajian | 2 |
| 20 | Kurangnya perhatian dari pemerintah | 1 |

| | | |
|----|---|---|
| 21 | Fasilitas kesehatan jauh dari pemukiman | 2 |
| 22 | Kebun milik warga diambil orang lain | 1 |
| 23 | Terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat | 1 |

Sumber: Hasil Refleksi Sosial Warga

Tabel 2. Tabulasi Data Potensi di Kampung Cipulus

| No | Potensi |
|----|--|
| 1 | Lahan pertanian seluas 60 hektar |
| 2 | Tingginya antusias masyarakat dalam bertani |
| 3 | Kaum muda yang giat dan memiliki semangat kerja |
| 4 | Hasil dan lahan pertanian unggul pada komoditas sayur, tembakau, kopi, dan ubi |
| 5 | Adanya agenda kelompok masyarakat |
| 6 | Keberadaan UMKM di desa |
| 7 | Tersedianya Lapangan Sirkuit Gunung Buleud sebagai aset desa |
| 8 | Semangat masyarakat untuk belajar |
| 9 | Aktifnya organisasi Karang Taruna |
| 10 | Penyebaran informasi cepat dan mudah |
| 11 | Karakter masyarakat yang pekerja keras |

Sumber: Hasil Refleksi Sosial Warga

Tabel 3. Tabulasi Data Harapan di Kampung Cipulus

| No | Harapan | Jumlah Individu yang Menyuarakan |
|----|---|----------------------------------|
| 1 | Hasil tani dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan | 4 |
| 2 | Anak-anak dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi | 4 |
| 3 | Tersedianya mobil ambulans di desa | 1 |
| 4 | Tersedianya modal usaha atau modal pertanian | 6 |

| | | |
|----|---|---|
| 5 | Lingkungan masyarakat yang lebih agamis | 1 |
| 6 | Pembentukan pribadi warga yang lebih baik | 1 |
| 7 | Tersedianya tempat air bersih yang mengalir dengan lancar | 2 |
| 8 | Adanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat | 5 |
| 9 | Petani dapat berkembang dan sejahtera | 1 |
| 10 | Terwujudnya Kampung Sejahtera | 4 |
| 11 | Permasalahan ekonomi masyarakat dapat teratasi | 4 |
| 12 | Pendirian Sekolah Tinggi di wilayah desa | 1 |
| 13 | Tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih luas | 1 |
| 14 | Perbaikan jalan gang di permukiman | 2 |
| 15 | Tersedianya tempat pengajian yang layak | 5 |
| 16 | Penyediaan fasilitas produktif bagi warga | 3 |
| 17 | Fasilitas kesehatan lebih dekat dan memadai | 2 |
| 18 | Perbaikan dan pengembangan sarana masjid | 2 |

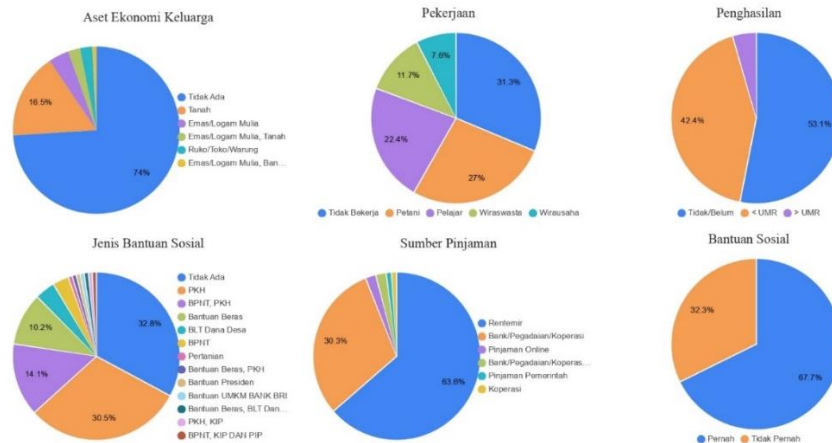
Sumber: Hasil Refleksi Sosial Warga

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa mayoritas warga Kampung Cipulus menggantungkan hidup dari sektor pertanian dengan proporsi 53,1%. Sektor ini bersifat musiman dan rentan terhadap perubahan cuaca dan harga komoditas. Sementara itu, sekitar 14,6% penduduk bekerja sebagai buruh harian lepas, 13,5% berwirausaha kecil, dan sisanya mengandalkan peternakan (5,2%), jasa informal, serta pekerjaan lain seperti guru honorer, ojek online, dan karyawan pabrik. Ketergantungan yang tinggi pada sektor informal menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam situasi ekonomi yang fluktuatif dan tidak pasti. Dalam konteks ini, pemetaan sosial berhasil mengungkap kerentanan struktural masyarakat yang sebelumnya tidak teridentifikasi secara sistemik.

Selain memetakan kondisi pekerjaan, pemetaan sosial juga mengungkap kondisi pendidikan masyarakat. Sebanyak 61,4% kepala keluarga di Kampung Cipulus hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD dan SMP, sementara hanya 7,3% yang menamatkan pendidikan tinggi. Rendahnya capaian pendidikan ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap peluang kerja formal dan program pelatihan yang memerlukan literasi tinggi. Kondisi ini mendukung temuan dari Wibowo dan Syam yang menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi ekonomi, yang berpengaruh pada rendahnya partisipasi

dalam program berbasis teknologi maupun akses ke permodalan digital (Azmi et al., 2023).

KONDISI EKONOMI KAMPUNG CIPULUS



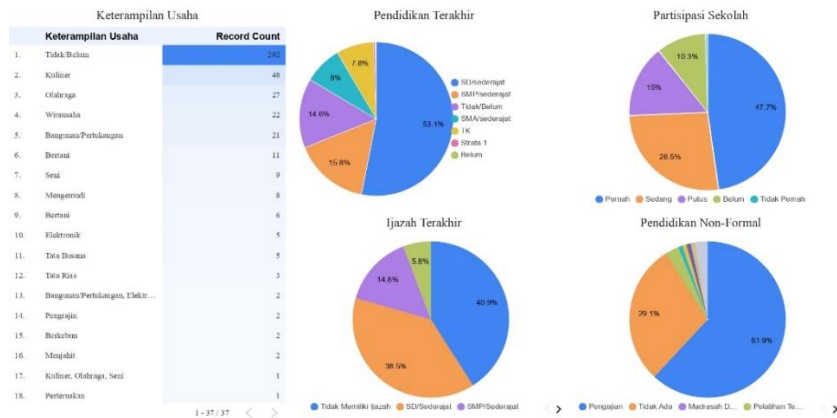
Sumber: Assessment Pemetaan Sosial

Gambar 3. Grafis Kondisi Ekonomi Kampung Cipulus

Namun, meskipun terdapat keterbatasan tersebut, pemetaan sosial juga menemukan berbagai potensi lokal yang selama ini belum dimaksimalkan. Banyak ibu rumah tangga memiliki keahlian dalam membuat makanan tradisional seperti keripik singkong. Produk ini sebenarnya telah beredar di pasar lokal, namun produksinya masih bersifat insidental dan belum terstandarisasi. Di sisi lain, terdapat kelompok pemuda yang memiliki keterampilan dasar dalam desain grafis, sablon, serta penggunaan media sosial untuk promosi produk. Potensi ini mencerminkan peluang untuk mengembangkan unit usaha mikro berbasis keluarga dan komunitas, yang selaras dengan pendekatan pembangunan ekonomi lokal.

Temuan di lapangan ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Kretzmann dan McKnight tentang *Asset-Based Community Development (ABCD)*, yang menekankan pentingnya menggali potensi internal masyarakat sebagai titik tolak pemberdayaan (Machendrawaty, Shodiqin, & Effendi, 2022). Pendekatan ini bertolak belakang dengan model *needs-based*, yang hanya menekankan pada kekurangan dan masalah (Sulastri, Sarbini, & Herdiana, 2023). Dalam konteks Kampung Cipulus, pendekatan ABCD sangat relevan karena menggambarkan bahwa meskipun masyarakat memiliki banyak keterbatasan, mereka juga menyimpan modal sosial dan keterampilan yang dapat dikembangkan (Hermawan Adinugraha, Al Masobih, Nafiyah, & Anas, 2024).

KONDISI PENDIDIKAN & KETERAMPILAN KAMPUNG CIPULUS



Sumber: Assessment Pemetaan Sosial

Gambar 4. Grafis Kondisi Pendidikan dan Keterampilan Kampung Cipulus

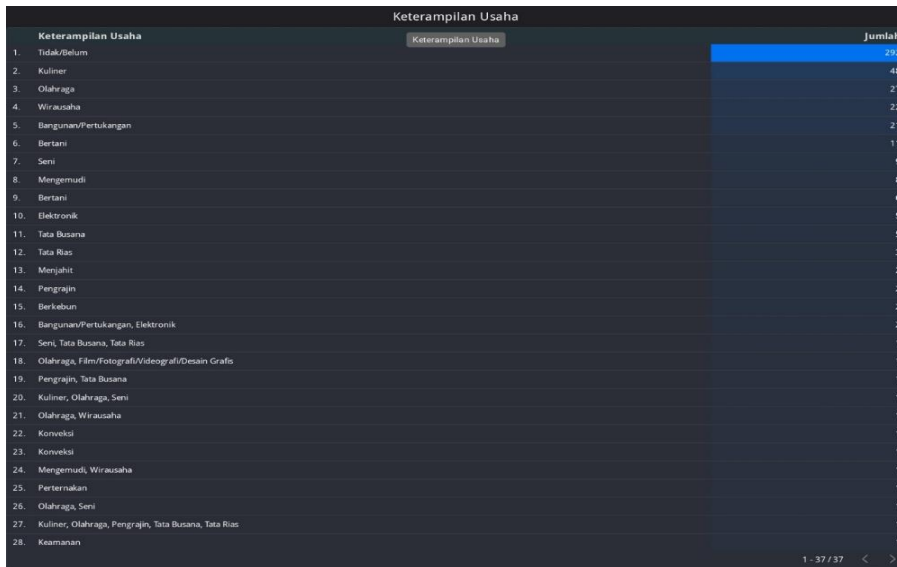
Peta sosial yang disusun dari hasil observasi partisipatif juga memperlihatkan adanya kesenjangan geografis antar wilayah RW. Wilayah RW 06 dan RW 07 lebih berkembang dalam hal akses jalan, keberadaan warung, serta konsentrasi usaha kecil. Sementara itu, wilayah RW 05 relatif tertinggal dalam aspek ekonomi maupun infrastruktur dasar. Data ini penting dalam menentukan wilayah intervensi prioritas, terutama dalam distribusi program pelatihan dan fasilitasi UMKM. Dalam riset serupa, Wardani juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah mikro untuk menghindari pendekatan homogen yang sering kali mengabaikan ketimpangan internal dalam komunitas desa (Mutmainah, 2020).

Dalam diskusi kelompok, masyarakat secara eksplisit menyebutkan bahwa pelatihan keterampilan usaha dan pemasaran digital adalah kebutuhan mendesak yang belum pernah difasilitasi oleh pemerintah desa maupun lembaga lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Aziz, bahwa salah satu hambatan utama dalam pemberdayaan ekonomi adalah minimnya intervensi pelatihan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, hasil pemetaan ini tidak hanya menjadi cerminan kondisi lapangan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar perumusan program yang relevan dengan konteks local (Aziz, 2010).

Pentingnya pemetaan sosial dalam pemberdayaan ekonomi juga ditekankan oleh Safei, yang menyatakan bahwa pemetaan yang dilakukan secara partisipatif dapat meningkatkan legitimasi program pemberdayaan karena mencerminkan aspirasi dan kapasitas masyarakat itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan warga dalam proses identifikasi kebutuhan telah membangun rasa kepemilikan terhadap data dan hasil, sehingga memperbesar

peluang keberhasilan implementasi program ke depan (Safei, 2016).

Dalam penyusunan program, masyarakat menunjukkan pemahaman mendalam terhadap pentingnya membentuk kelembagaan ekonomi kolektif. Program ini didasarkan pada pemanfaatan hasil pertanian dan potensi keterampilan warga dalam usaha kuliner, pertukangan, maupun kerajinan tangan. Diskusi dalam forum juga memperlihatkan kesadaran warga akan pentingnya struktur organisasi, transparansi pengelolaan, dan strategi pemasaran berbasis teknologi digital, yang secara tidak langsung mencerminkan peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi warga.



| Keterampilan Usaha | Jumlah |
|--|--------|
| 1. Tidak/Belum | 292 |
| 2. Kuliner | 48 |
| 3. Olahraga | 27 |
| 4. Wirausaha | 22 |
| 5. Bangunan/Pertukangan | 21 |
| 6. Bertani | 11 |
| 7. Seni | 9 |
| 8. Mengemudi | 8 |
| 9. Bertani | 6 |
| 10. Elektronik | 5 |
| 11. Tata Busana | 5 |
| 12. Tata Rias | 3 |
| 13. Menjahit | 2 |
| 14. Pengrajin | 2 |
| 15. Berkebun | 2 |
| 16. Bangunan/Pertukangan, Elektronik | 2 |
| 17. Seni, Tata Busana, Tata Rias | 1 |
| 18. Olahraga, Film/Fotografi/Videografi/Desain Grafis | 1 |
| 19. Pengrajin, Tata Busana | 1 |
| 20. Kuliner, Olahraga, Seni | 1 |
| 21. Olahraga, Wirausaha | 1 |
| 22. Konveksi | 1 |
| 23. Konveksi | 1 |
| 24. Mengemudi, Wirausaha | 1 |
| 25. Pertanian | 1 |
| 26. Olahraga, Seni | 1 |
| 27. Kuliner, Olahraga, Pengrajin, Tata Busana, Tata Rias | 1 |
| 28. Keamanan | 1 |

Sumber: Assessment Pemetaan Sosial

Gambar 5. Tabulasi Data Keterampilan Usaha Warga Kampung Cipulus

Jika dilihat melalui prespektif data spasial yang dikumpulkan pada Pemetaan Sosial, penyusunan program Cipukuar ini didasari dari salah satu permasalahan yang paling banyak disuarakan pada proses identifikasi Permasalahan yaitu berkaitan dengan Keterbatasan Ekonomi dan Modal Usaha. Lalu kemudian, permasalahan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan beberapa cara, salah satunya kami melihat potensi keterampilan usaha yang dimiliki oleh warga Kampung Cipulus yang paling di dominasi yaitu Keterampilan Usaha di bidang Kuliner, serta disamping itu pembahsan berkaitan dengan pembentukan kelompok cipukuar ini akan menjadikan sebuah penyelesaian dari keresahan yang dirasakan oleh beberapa warga berkaitan dengan masalah lapangan pekerjaan yang terbilang cukup jauh.

Program Cipukar ini kemudian menjadi salah satu solusi yang muncul dari hasil diskusi yang merujuk terhadap hasil identifikasi masalah, potensi dan harapan yang diselaraskan dengan hadirnya dokumen pemetaan sosial untuk menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kemudian dari pembentukan program Cipukar ini bisa dapat berlanjut dengan menggunakan rujukan yang menjadi tolak ukur dari berjalannya program ini.

Dengan demikian, pemetaan sosial berfungsi tidak hanya sebagai instrumen awal untuk mengenali kondisi objektif masyarakat, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menyusun agenda perubahan yang inklusif. Keberhasilan proses ini sangat ditentukan oleh keterlibatan warga secara aktif serta pendekatan yang sensitif terhadap struktur sosial dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, tahap identifikasi ini menjadi fondasi penting dalam siklus riset aksi, karena mampu menghubungkan antara realitas sosial, kapasitas lokal, dan intervensi ekonomi yang kontekstual.

Proses Konsensus Antara Peneliti dan Masyarakat

Konsensus antara peneliti dan masyarakat merupakan elemen kunci dalam pendekatan riset aksi berbasis partisipasi. Konsensus bukan sekadar kesepakatan administratif atau formalitas dalam penyusunan program, melainkan hasil dari interaksi sosial yang mendalam, reflektif, dan dialogis antara berbagai aktor yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, konsensus dibangun melalui serangkaian pertemuan partisipatif yang dimulai dari tahap pengenalan, dialog sosial, *Focus Group Discussion (FGD)*, hingga rembug warga. Seluruh tahapan ini tidak hanya menjadi sarana untuk menggali informasi, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk pemahaman bersama tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan strategi intervensi yang paling sesuai.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, proses konsensus berlangsung secara berjenjang dan melibatkan struktur sosial lokal seperti ketua RW, tokoh agama, kader PKK, dan kelompok pemuda. Proses awal diawali dengan pemaparan hasil pemetaan sosial kepada warga melalui media visual sederhana, seperti peta sosial manual dan sketsa potensi wilayah. Strategi ini digunakan untuk membuka ruang partisipasi warga agar dapat memberikan koreksi, validasi, serta menyampaikan interpretasi mereka atas data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan McNiff dan Whitehead bahwa riset aksi mengutamakan dialog kolaboratif yang setara sebagai dasar dari perubahan sosial (Syukur, 2024).

Dalam rembug warga yang dilakukan pada akhir bulan kedua, peneliti memfasilitasi forum diskusi terbuka untuk menyusun prioritas program. Dari diskusi ini, masyarakat secara terbuka menyampaikan bahwa masalah utama yang

mereka hadapi bukan hanya keterbatasan modal, tetapi juga minimnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan dan pengetahuan pemasaran digital. Kesepakatan yang tercapai dalam forum ini melahirkan tiga program prioritas: pelatihan usaha mikro berbasis potensi lokal, penguatan UMKM melalui pendampingan kelembagaan, dan pelatihan pemasaran digital. Fakta ini mengonfirmasi hasil studi dari Kurniadi yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kebutuhan warga dan desain program yang ditawarkan (Kurniadi et al., 2022).

Proses dialogis ini mencerminkan tahapan pembentukan konsensus deliberatif sebagaimana dijelaskan oleh Habermas dalam konsep *communicative action*. Dalam pendekatan ini, ruang komunikasi publik menjadi arena penting untuk membangun pengertian bersama (*mutual understanding*) antara pihak luar dan komunitas lokal. Diskusi yang berlangsung dalam forum rembug warga memperlihatkan adanya kesetaraan peran antara peneliti dan warga sebagai subjek kolektif dalam proses pemberdayaan. Hal ini menjadi pembeda utama dari pendekatan konvensional yang menempatkan masyarakat sebagai objek.

Menariknya, dalam proses konsensus tersebut, terjadi juga negosiasi makna antara peneliti dan warga terkait istilah “pemberdayaan.” Sebagian warga memahami pemberdayaan sebagai bentuk bantuan materi, sementara peneliti mencoba menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses membangun kemandirian dan kapasitas. Dialog ini menjadi titik reflektif yang penting karena menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman konseptual antara pihak eksternal dan komunitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Siregar dalam Jurnal Ilmu Dakwah, keberhasilan pemberdayaan memerlukan dekonstruksi makna-makna lama yang menempatkan masyarakat sebagai penerima pasif menuju posisi subjek aktif dalam perubahan sosial (Siregar, 2021).

Dalam proses konsensus tersebut, peneliti juga menggunakan strategi fasilitasi berbasis pengalaman untuk memperkuat keterlibatan masyarakat. Misalnya, saat membahas strategi usaha, peneliti meminta salah satu pelaku usaha rumahan untuk menceritakan pengalaman dan tantangan dalam memasarkan produk. Praktik ini sejalan dengan pendekatan *experiential learning* yang dikembangkan oleh Kolb, di mana pengetahuan dibangun dari pengalaman langsung dan refleksi sosial. Strategi ini berhasil memicu respons emosional dan kognitif warga sehingga mendorong mereka lebih aktif dalam menyusun solusi secara kolektif.

Pembentukan konsensus juga sangat dipengaruhi oleh dinamika kepemimpinan lokal. Dalam hal ini, keberadaan tokoh informal seperti sesepuh kampung, ustaz, dan pemuka adat berperan sebagai jembatan kepercayaan antara peneliti dan masyarakat. Kepercayaan (*trust*) menjadi modal penting dalam

memfasilitasi diskusi yang terbuka dan jujur, terutama ketika membahas isu-isu sensitif seperti ketimpangan akses bantuan pemerintah atau konflik antar kelompok warga.

Konsensus yang terbentuk akhirnya tidak hanya menghasilkan daftar program, tetapi juga membentuk struktur kelembagaan lokal yang akan mengawal proses pelaksanaan. Sebuah kelompok kerja dibentuk berdasarkan hasil forum rembung, yang terdiri dari perwakilan RW, pemuda, dan ibu rumah tangga. Kelompok ini diberi mandat untuk menjadi mitra lokal peneliti dalam proses monitoring dan evaluasi program. Praktik ini memperkuat gagasan Abdoellah mengenai pentingnya *conscientization* atau kesadaran kritis dalam proses pembebasan sosial (Abdoellah, Sunardi, Widianingsih, & Fani Cahyandito, 2019). Ketika masyarakat mulai menyadari bahwa mereka memiliki otoritas untuk merancang masa depan sendiri, maka pemberdayaan tidak lagi bergantung pada kehadiran eksternal.

Dengan demikian, proses konsensus dalam pemetaan sosial bukan sekadar mekanisme teknis untuk menyusun program, tetapi juga merupakan proses pembelajaran kolektif yang membangun kesadaran, kepercayaan, dan kepemilikan sosial atas perubahan. Proses ini menegaskan bahwa pendekatan riset aksi yang dilandasi prinsip dialogis dan kesetaraan memiliki efektivitas tinggi dalam menciptakan intervensi yang sesuai dengan konteks lokal. Dalam konteks Kampung Cipulus, konsensus menjadi instrumen transformatif yang menjembatani antara realitas sosial masyarakat dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang kontekstual dan partisipatif.

Peran Norma dalam Menciptakan Pemberdayaan yang Berkelanjutan

Keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh efektivitas perencanaan dan implementasi teknis, tetapi juga sangat bergantung pada kekuatan norma sosial yang hidup dalam komunitas. Dalam konteks Kampung Cipulus, norma sosial berperan sebagai fondasi nilai yang merekatkan struktur sosial dan memperkuat daya lenting masyarakat terhadap perubahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa norma seperti gotong royong, musyawarah mufakat, rasa hormat terhadap tokoh adat dan agama, serta kebiasaan kolektif dalam mengelola sumber daya bersama menjadi elemen yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan proses pemberdayaan ekonomi.

Hasil pemetaan sosial dan observasi partisipatif memperlihatkan bahwa norma gotong royong tidak hanya hadir dalam kegiatan fisik seperti pembangunan jalan atau membersihkan saluran air, tetapi juga tampak dalam solidaritas ekonomi. Sebagai contoh, ketika salah satu warga hendak memulai

usaha kecil, tetangga sekitar turut membantu dalam bentuk tenaga, promosi dari mulut ke mulut, bahkan pinjaman tanpa bunga. Dukungan sosial semacam ini menunjukkan adanya modal sosial yang tinggi dalam komunitas, yang dalam perspektif pembangunan merupakan sumber daya non-ekonomi yang dapat dikonversi menjadi dukungan terhadap keberhasilan program pembangunan (Aisyah & Rahayu, 2019). Dalam penelitian ini, nilai gotong royong menjadi penguat utama pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan dan pendampingan UMKM yang disepakati dalam konsensus warga.

Peran norma sosial sebagai mekanisme pengikat kolektif juga terlihat dalam pola musyawarah mufakat yang dilakukan warga saat menentukan arah program. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam forum rembuk warga, tokoh masyarakat mengambil peran sebagai fasilitator yang mengedepankan pendekatan dialogis dan nilai kebersamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa norma lokal telah menjadi instrumen resolusi konflik yang efektif, dan berfungsi menjaga stabilitas sosial dalam proses transformasi ekonomi. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Gustian yang menekankan bahwa musyawarah sebagai norma khas masyarakat Indonesia merupakan salah satu prasyarat utama keberlanjutan dalam program pemberdayaan berbasis komunitas (Gustian et al., 2023).

Norma sosial dalam masyarakat Cipulus juga tampak dalam bentuk kepatuhan terhadap otoritas lokal seperti tokoh agama dan ketua RW. Mereka tidak hanya dihormati sebagai pemimpin struktural, tetapi juga dijadikan rujukan moral dan sosial dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini, program pemberdayaan yang mendapat dukungan dari para tokoh ini cenderung memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Kehadiran mereka dalam forum-forum diskusi serta keterlibatan langsung dalam mendampingi program pelatihan telah memperkuat rasa percaya diri warga dalam berpartisipasi aktif. Studi yang dilakukan oleh Ihsani menyebutkan bahwa legitimasi program pembangunan meningkat signifikan ketika program tersebut didukung oleh tokoh lokal yang memiliki kredibilitas sosial dan spiritual (Ihsani, Febriyanti, & Syakuuroo S.K, 2021).

Nilai-nilai sosial ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem norma yang telah terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim bahwa norma sosial bekerja sebagai *moral glue* yang menyatukan anggota masyarakat dalam kerangka kolektif yang stabil. Dalam penelitian ini, norma menjadi penggerak partisipasi dan kontrol sosial yang efektif dalam setiap tahapan program, dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat cenderung menjaga komitmen terhadap program karena merasa bahwa keberhasilan atau kegagalan program bukan hanya tanggung jawab

individu, tetapi juga menyangkut kehormatan komunitas.

Lebih lanjut, norma juga memainkan peran dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan. Dalam beberapa kasus, ditemukan warga yang awalnya skeptis terhadap program pelatihan dan pemasaran digital, karena merasa tidak memiliki kompetensi teknologi. Namun, melalui pendekatan sosial berbasis nilai kebersamaan dan penguatan jejaring komunitas, resistensi tersebut perlahan menurun. Proses ini memperlihatkan bahwa transformasi sosial tidak terjadi secara linier, melainkan memerlukan legitimasi sosial yang dibentuk melalui norma yang telah hidup dan dipraktikkan dalam komunitas.

Temuan ini selaras dengan kerangka dalam PkM Sisdamas yang menekankan pentingnya norma dan nilai lokal dalam membangun keberlanjutan program pemberdayaan. Dalam siklus Sisdamas, keberhasilan intervensi sangat bergantung pada integrasi antara data objektif hasil pemetaan dan nilai-nilai sosial yang menopang tindakan kolektif. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa keberhasilan program bukan hanya berasal dari desain berbasis kebutuhan (*needs-based*), tetapi juga karena adanya dukungan kuat dari sistem nilai lokal.

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, norma sosial memiliki fungsi sebagai sistem kontrol yang menjaga akuntabilitas dan komitmen kolektif. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan program pelatihan, warga secara sukarela membentuk jadwal kerja kelompok dan membagi tugas secara adil. Setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab untuk hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas, dan mendukung sesama anggota. Ini mencerminkan adanya kontrol internal yang bersumber dari nilai kebersamaan, bukan sekadar aturan formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Hermawan Adinugraha dkk. (2024) yang menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan berbasis nilai akan lebih kuat jika kontrol sosial berasal dari dalam komunitas itu sendiri (Hermawan Adinugraha et al., 2024).

Dengan demikian, norma sosial berperan bukan hanya sebagai bingkai budaya yang melatari praktik ekonomi, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam menjamin keberlanjutan program pemberdayaan. Norma tidak hanya memfasilitasi keterlibatan masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial terhadap keberhasilan program. Dalam konteks Kampung Cipulus, keberadaan norma sosial yang kuat telah memberikan landasan yang kokoh bagi implementasi dan keberlanjutan program, menjadikan pemberdayaan bukan sekadar proyek jangka pendek, tetapi proses perubahan sosial yang terinternalisasi.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara pemetaan sosial dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pendekatan yang partisipatif, berbasis bukti, dan kontekstual. Pemetaan sosial terbukti efektif sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan riil dan potensi lokal yang sebelumnya tidak terorganisasi secara sistematis. Dalam konteks Kampung Cipulus, pemetaan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengartikulasikan masalah struktural seperti keterbatasan akses modal, minimnya keterampilan usaha, dan rendahnya penetrasi pasar, sekaligus mengungkap berbagai potensi ekonomi berbasis keluarga dan komunitas yang dapat dikembangkan. Pendekatan ini memungkinkan desain intervensi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Lebih lanjut, proses pembentukan konsensus antara peneliti dan masyarakat mencerminkan pentingnya perencanaan yang deliberatif dan inklusif. Keterlibatan warga dalam forum rembung, diskusi kelompok, dan validasi data membangun rasa kepemilikan terhadap agenda pemberdayaan yang dirancang. Konsensus tidak sekadar menjadi sarana perumusan program, melainkan juga menjadi ekspresi kolektif dari kesadaran sosial yang berkembang melalui interaksi yang setara antara peneliti dan komunitas. Dalam situasi tersebut, pemetaan sosial menjelma menjadi ruang belajar sosial yang memungkinkan terbentuknya inovasi kolaboratif, kepercayaan timbal balik, serta legitimasi atas setiap keputusan yang diambil bersama.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa norma sosial memainkan peran penting dalam menjamin keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi. Di Kampung Cipulus, norma gotong royong, solidaritas komunitas, dan kepercayaan terhadap tokoh lokal terbukti menjadi kekuatan yang mendorong partisipasi aktif, pembagian peran secara adil, serta pembentukan mekanisme kontrol sosial yang tidak bergantung pada institusi formal. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai perekat sosial sekaligus pendorong internal yang menjaga komitmen kolektif terhadap keberhasilan program. Integrasi antara pendekatan teknokratis dengan struktur nilai lokal menjadikan pemberdayaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi kultural yang lebih dalam.

Hasil penelitian ini memberikan refleksi bahwa upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat akan lebih efektif apabila diawali dengan pemetaan sosial yang menyeluruh, dibangun melalui konsensus yang deliberatif, dan dikuatkan oleh norma-norma lokal yang hidup. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, pendekatan seperti ini mendorong terwujudnya transformasi sosial

yang bukan hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki daya tahan untuk berkembang dalam jangka panjang. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi dampak integrasi pemetaan sosial terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat secara longitudinal, serta mengembangkan pendekatan serupa dalam konteks komunitas lain yang memiliki kompleksitas sosial yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., Sunardi, Widianingsih, I., & Fani Cahyandito, M. (2019). Pemetaan Sosial Dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Citarum Hulu, Kabupaten Bandung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 59–71. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i3.24461>
- Abidin, Z., & Mais, R. G. (2022). Pemetaan Sosial Terintegrasi Sebagai Dasar Pelaksanaan CSR, Studi Kasus PT Bumi Suksesindo di Banyuwangi. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)* |, 13(1), 2301–8313. <https://doi.org/10.21009/JRMSI>
- Ahriani, A. (2022). Dakwah Berbasis Pemberdayaan Pada Masyarakat Muslim Kokoda Kota Sorong Papua Barat Daya. *Indonesian Annual Coference Series*, 1.
- Aisyah, S., & Rahayu, E. W. (2019). Tata Cara Pelaksanaan Rokot Bārlobārān di Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. *APRON Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan*, Vol. 1, p. 13.
- Almuarif, Hanani, S., Devi, I., & Syafitri, A. (2023). Solidaritas dan Integrasi Sosial dalam Konteks Manajemen Pendidikan: Analisis Berdasarkan Teori Émile Durkheim. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 295–306. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.794>
- Aziz, R. (2010). Dakwah dalam Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Muslim. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(16), 117–144.
- Azmi, A. F., Frayoga, M., Syam, M., Iqbal, M., Budiman, A., & Ag, M. (2023). Peran Mahasiswa KKN UIN Sunan Gunung Djati Dalam Menguatkan Komitmen Kebangsaan Terhadap Masyarakat Desa Bongas.
- Cochrane, L., Corbett, J., & Keller, C. P. (2014). *Impact of Community-based and Participatory Mapping*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4522.5360>
- Efendi, M. Y., Kustiari, T., Sulandjari, K., Sifat, W. O., Ginting, S., Arief, A. S., ... Nurhidayah, R. E. (2021). *Metode Pemberdayaan Masyarakat*.
- Fridayanti, F., Sururie, R. W., Aziz, R., Uriawan, W., Zulqiah, Z., & Mardiansyah, Y. (2019). Model KKN Sisdamas UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Tantangan dan Peluang Pelaksanaan. *Al-Khidmat*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.15575/jak.v2i1.4832>

- Gunawan, W., & Sutrisno, B. (2021). Pemetaan Sosial Untuk Perencanaan Pembangunan Masyarakat. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 2(2), 94. <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.32761>
- Gustian, A. S., Utami, L. A. P., Fatahillah, M., Nurhayati, N. R., Fatmawati, R., Fatimatuzzahra, S., & Fitri, S. (2023). Analisis Social Mapping Terhadap Masyarakat Dusun Pamubutan, Desa Cipetir, Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.54082/jupin.104>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rebla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 82(2), 2776–7434. <https://doi.org/10.21274>
- Hermawan Adinugraha, H., Al Masobih, I., Nafiyah, I., & Anas, A. (2024). Community Empowerment in Kebanggan Village: Asset-Based Community-Driven Development (ABCD) Approach. *Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 3(1). Retrieved from <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/ikhlas/index>
- Ihsani, A. F. A., Febriyanti, N., & Syakuuroo S.K, A. (2021). GUS DUR'S MULTICULTURAL DA'WAH AND ITS RELEVANCE TO MODERN SOCIETY. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 23(1), 103–122. <https://doi.org/10.18860/eh.v23i1.11642>
- Khalil, M., Al-Kholifi, A., Rahmawan, U., Istiqomah, R. N. A., Rahayu, N. A., Darmansyah, ... Berliana, A. (2024). *Pendampingan Anak dan Perempuan Tani Pada Masyarakat Transisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung.
- Kurniadi, D., Mulyani, A., Firmansyah, M., & Abania, N. (2022). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Garut. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(6), 1307–1314. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022956098>
- Leuhery, F., Amalo, F., Cakranegara, P. A., Widaningsih, R. R. A., & Mere, K. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengentaskan Kemiskinan. *Communnity Development Journal*, 4(4), 8273–8277.
- Machendrawaty, N., Shodiqin, A., & Effendi, D. I. (2022). Da'wah Education Based on Religious Moderation Training Using Digital Technology at Islamic Boarding Schools in East Bandung. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1), 109–134. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i1.18124>
- Meilindika, R., & Khairunnisa, A. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Islam. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(7).
- Mutmainah, N. F. (2020). Peran Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan UMKM di Kabupaten Bantul. *Jurnal Wadana*, VI(1), 1–7.
- Nuryati, R., Sulistyowati, L., Setiawan, I., & Noor, T. I. (2020). Pemetaan Sosial

- (Social Mapping) Masyarakat dalam Upaya Mendukung Pengembangan Usaha Tani Polikultural Perkebunan Terintegrasi (UTPPT). *Jurnal Agristan*, 2(1).
- Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi dalam Meningkatkan Kualitas Program. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 2(1).
- Putra, M. U. M., & Dilham, A. (2017). Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Dumai Timur (Studi Kasus: Kelurahan Bukit Timah). *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 7(1), 1.
- Rela, I. Z. (2023). Pemetaan Sosial dan Partisipasi Stakeholder dalam Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.56189/jippm.v3i1.35478>
- Safei, A. A. (2016). Development of Islamic Society Based on Majelis Ta'lim: A study of the Shifting Role of the Majelis Ta'lim in West Java. *American Journal of Applied Sciences*, 13(9), 947–952. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2016.947.952>
- Siregar, M. (2021). Membaca Peta Dakwah Kota Langsa: Upaya Merumuskan Strategi Dakwah yang Kontributif Bagi Masyarakat. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 8(2). Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/komunika>
- Siti Jubaedah, I., Kuswana, D., Diesy Fitriani, P., Djati, G., Manajemen Haji dan Umrah, J., Dakwah dan Komunikasi, F., & Sunan Gunung Djati, U. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program BJB Mesra dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(4), 357–378.
- Sulastri, S., Sarbini, A., & Herdiana, D. (2023). Peran Yayasan Baitul Mal PLN dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: Studi deskriptif YBM PLN UID Jawa Barat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(April), 145–164. Retrieved from <https://digilib.uinsgd.ac.id/77278/>
- Syukur, M. (2024). Perencanaan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dangara'a Kecamatan Pinembani Kabupaten Sigi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4711–4722. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6592>
- Wiyanto, D. B., & Parmadi. (2019). Pemetaan Sosial Dampak Keberadaan Terminal BBM Pertamina di Kecamatan Camplong Sampang Madura. *Jurnal Pamator*, 12(1), 23–24.
- Yuliadi, I., & Apriansyah, A. (2025). Pemetaan Konflik Sosial Pasca Pembekaran Kertas Suara di Pemilu 2024 di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 28–39. Retrieved from <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>